

PERAN KOMUNIKASI STRATEGIS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN SEKTOR SWASTA UNTUK MENDUKUNG TARGET KAWASAN KONSERVASI LAUT DAN OECM 30X45

Dian Agustine Nuriman¹, Willi Bachtiar², Yudi Herdina³, Irfan Yulianto⁴

¹Faculty of Communication Science, Mercubuana University, Jl. Meruya Selatan No.1, RT.4/RW.1, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia,

²Vocational School, IPB University, Jl. Kumbang No.14 Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Indonesia,

³Konversi Indonesia, Jl. Buncit Raya No. 22, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Indonesia.

⁴Faculty of Fisheries and Marine Sciences, IPB University, Jl. Agatis, Babakan, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

⁵Fisheries Resource Center of Indonesia, Rekam Nusantara Fondation, Jl. Sempur 35.

E-mail korespondensi: dianagustinenuriman@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan penurunan keanekaragaman hayati laut telah mendorong kebutuhan mendesak untuk memperkuat pengelolaan Kawasan Konservasi laut. Salah satu upaya global yang tengah digencarkan adalah target perlindungan 30% wilayah laut pada tahun 2030 (MPA 30x30), yang menuntut dukungan luas dari berbagai sektor, termasuk sektor swasta. Menindaklanjuti komitmen global tersebut, Indonesia menargetkan perlindungan 30% wilayah perairannya melalui perluasan Kawasan Konservasi dan Kawasan Berdampak Konservasi atau OECM pada tahun 2045 (MPA dan OECM 30x45). Namun, tingkat keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan konservasi masih menghadapi tantangan, terutama terkait rendahnya kepercayaan terhadap efektivitas dan keberlanjutan program pengelolaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana komunikasi strategis dan keterlibatan pemangku kepentingan dapat membangun kepercayaan sektor swasta dalam pendanaan program MPA 30x45. Melalui studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap berbagai aktor terkait. Analisis tematik mengungkap bahwa pola komunikasi yang adaptif, kolaboratif, dan transparan, serta keterlibatan aktif pemangku kepentingan, berperan penting dalam membentuk kepercayaan sektor swasta terhadap program MPA dan OECM 30x45. Praktik efektif mencakup penyampaian data sosial-ekonomi, dialog inklusif, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta konsistensi pesan, akuntabilitas, dan penekanan pada manfaat ekonomi jangka panjang sebagai daya tarik investasi. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi strategis dan keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun kepercayaan sektor swasta dalam investasi konservasi laut. Karena itu, program MPA dan OECM 30x45 perlu menyusun strategi komunikasi yang sistematis dan responsif terhadap kebutuhan, aspirasi, dan ekspektasi sektor swasta dalam kerangka tata kelola ekonomi biru.

Kata Kunci: komunikasi strategis, kepercayaan investor, kawasan konservasi laut 30x45, keterlibatan pemangku kepentingan, pembangunan ekonomi.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan penurunan keanekaragaman hayati laut merupakan isu global yang semakin mendesak dan menuntut respons melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu upaya konservasi kini menjadi komitmen global adalah target perlindungan 30% wilayah laut dunia pada tahun 2030, yang dikenal sebagai komitmen 'Target 30x30'. Sebagai bentuk partisipasi terhadap inisiatif tersebut, Indonesia telah menetapkan target perlindungan 30% wilayah perairannya melalui pembentukan, perluasan, dan pengelolaan Kawasan Konservasi (KK) serta Kawasan Berdampak Konservasi (KBK), atau dikenal sebagai Other Effective area-based Conservation Measure (OECM), pada tahun 2045. Komitmen tersebut dikenal sebagai Visi MPA dan OECM 30x45 Indonesia (KKP, 2025). Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan lintas aktor, termasuk sektor swasta yang memiliki potensi signifikan dalam mendanai upaya konservasi. Namun, partisipasi sektor swasta dalam pendanaan kawasan konservasi laut masih relatif rendah. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain rendahnya tingkat kepercayaan terhadap efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, kurangnya transparansi program, serta ketidakpastian terkait manfaat ekonomi jangka panjang yang dapat diperoleh (Bennett et al., 2019; Chuenpagdee & Jentoft, 2020).

Dalam konteks ini, komunikasi strategis memainkan peran kunci dalam membangun kepercayaan antara pengelola Kawasan Konservasi dan sektor swasta. Komunikasi yang partisipatif, transparan, dan berbasis kolaborasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang memungkinkan terbentuknya narasi bersama dan pemahaman yang selaras mengenai nilai ekologis dan ekonomis dari konservasi laut (Cvitanovic et al., 2021). Strategi komunikasi yang dirancang secara tepat dapat memperkuat persepsi positif terhadap tata kelola Kawasan Konservasi, sekaligus meningkatkan keyakinan sektor swasta bahwa investasi mereka akan memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi strategis dalam membangun kepercayaan sektor swasta untuk berkontribusi dalam pendanaan program MPA dan OECM 30x45. Fokus utama penelitian diarahkan pada pemahaman pola komunikasi, dinamika keterlibatan pemangku kepentingan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan investor terhadap keberlanjutan pengelolaan Kawasan Konservasi. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik komunikasi lintas sektor yang efektif dalam mendorong partisipasi sektor swasta dalam pendanaan program-program konservasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana komunikasi strategis berperan membangun kepercayaan sektor swasta terhadap efektivitas program Kawasan Konservasi laut; (2) mekanisme komunikasi dan bentuk keterlibatan seperti apa yang efektif dalam menarik minat investasi dari sektor swasta; dan (3) faktor apa saja yang memengaruhi terbentuknya persepsi dan kepercayaan investor terhadap program MPA dan OECM 30x45. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi strategis dan tata kelola konservasi laut berbasis kolaborasi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pengelola Kawasan Konservasi dan pemerintah sebagai

pembuat kebijakan dalam merancang strategi komunikasi yang lebih adaptif, transparan, dan inklusif.

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi sangat ditentukan oleh proses komunikasi yang melibatkan aktor-aktor kunci secara partisipatif. Cvitanovic et al. (2021) menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor dalam konservasi memerlukan strategi komunikasi yang didasarkan pada kepercayaan dan transparansi. Dalam konteks ini, pendekatan komunikasi strategis berbasis pemangku kepentingan menjadi krusial untuk menjembatani kepentingan antara sektor konservasi dan sektor privat (Faulkner et al., 2018). Selain itu, teori kepercayaan yang dikembangkan oleh Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) tetap relevan, terutama dalam menjelaskan bahwa persepsi terhadap kompetensi, integritas, dan niat baik merupakan faktor kunci yang membentuk tingkat kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi strategis. Oleh karena itu, strategi komunikasi untuk mendukung MPA dan OECM 30x45 perlu dirancang secara sistematis dengan mengintegrasikan dimensi kepercayaan, aspirasi sektor swasta, serta bukti nyata dampak sosial-ekonomi dari Kawasan Konservasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam peran komunikasi strategis dalam membangun kepercayaan sektor swasta untuk pendanaan program MPA dan OECM 30x45. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang menekankan pada pemahaman kontekstual, interpretatif, dan kompleksitas interaksi antaraktor dalam dinamika komunikasi strategis dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta dan Sulawesi Utara, yang merupakan pusat kegiatan Kementarian Kelautan dan Perikanan sebagai otoritas kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi laut, dan juga sebagai lokasi operasional mayoritas perusahaan sektor swasta yang menjadi target partisipasi dalam pembiayaan program MPA dan OECM 30x45. Penelitian dilaksanakan selama periode Januari hingga Juni 2025, dengan melibatkan sejumlah informan kunci dari berbagai latar belakang, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Sektor Swasta dan Pemerintah daerah.

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam eksplorasi informasi sekaligus menjaga fokus pada tema utama penelitian. Selanjutnya, observasi dilakukan dalam berbagai forum komunikasi multipihak, seperti pertemuan koordinasi, diskusi publik, dan lokakarya yang membahas strategi pendanaan konservasi laut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung interaksi, narasi, dan strategi komunikasi yang diterapkan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Teknik ini mencakup proses identifikasi, pengorganisasian, dan interpretasi pola-pola makna dalam data kualitatif. Langkah-langkah dalam proses analisis meliputi transkripsi data, pembacaan dan peninjauan ulang data, pengkodean awal, pencarian tema, peninjauan

dan pengembangan tema, serta interpretasi dan penarikan makna dalam konteks peran komunikasi strategis. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, membandingkan informasi dari berbagai informan dan bentuk data (wawancara dan observasi), serta *member checking* untuk mengonfirmasi interpretasi dengan para informan.

Kerangka analisis dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan komunikasi strategis yang mengintegrasikan konsep *trust-building* (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995) dan *stakeholder engagement* (Freeman, 1984). Kerangka ini digunakan untuk mengkaji bagaimana komunikasi yang bersifat kolaboratif, partisipatif, dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan sektor swasta terhadap efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Kawasan Konservasi laut. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mendeksripsikan proses komunikasi yang terjadi, tetapi juga mengevaluasi dampak komunikatif terhadap dukungan pembiayaan konservasi laut oleh sektor swasta.

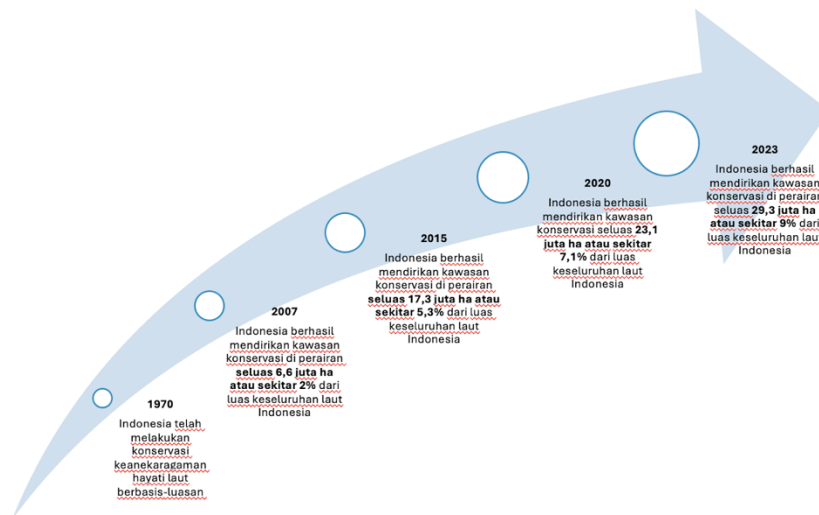
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara pihak (*Party*) yang telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity/CBD*), Indonesia memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan konvensi tersebut. Salah satu rekomendasi terbaru adalah Target 3 dari Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (*Post-2020 Global Biodiversity Framework*), yang menetapkan target perlindungan 30% wilayah daratan dan perairan dunia melalui jejaring Kawasan Konservasi Laut dan *Other Effective area-based Conservation Measures* (OECM) pada tahun 2030 (Target 30x30). Menindaklanjuti komitmen tersebut, pada *Our Ocean Conference* ke-9 di Athena, Pemerintah Indonesia menyatakan target nasional untuk memperluas kawasan konservasi pesisir dan laut hingga mencapai 30% dari luas perairan Indonesia atau sekitar 97,5 juta hektare, pada tahun 2045. Komitmen ini dikenal sebagai Visi MPA dan OECM 30x45.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama para pemangku kepentingan seperti LSM, universitas dan pakar konservasi laut telah merumuskan dokumen strategis berjudul *Visi Kawasan Konservasi dan OECM 2045: Strategi Terpadu Menuju Laut Indonesia Lestari dan Berkelanjutan untuk mewujudkan MPA 30x45*. Dokumen ini menjadi panduan arah kebijakan nasional dalam pembangunan jejaring Kawasan Konservasi Laut dan OECM menuju tahun 2045. Sejak tahun 2022 hingga 2025, berbagai lokakarya telah diselenggarakan untuk menyusun Visi 2045 tersebut. Proses ini dipimpin oleh KKP dan melibatkan mitra utama dari berbagai sektor. Hasil dari proses ini memperkuat Target 30x45 sebagai manifestasi target global 30x30, yang tidak hanya menekankan pada perlindungan Kawasan, tetapi juga pada integrasi pemanfaatan berkelanjutan, tata Kelola partisipatif, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

Perkembangan arah kebijakan dan strategi tersebut sejalan dengan peningkatan luas Kawasan konservasi laut di Indonesia yang terus menunjukkan tren positif dari waktu ke waktu. Grafik capaian nasional Kawasan Konservasi Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati laut dari tahun 1970 hingga 2023. Pada tahun 1970, Indonesia mulai melakukan konservasi laut secara berbasis luasan. Kemudian pada tahun 2007, Indonesia berhasil menetapkan kawasan konservasi seluas 6,6 juta hektar atau sekitar 2% dari total luas laut nasional. Capaian ini meningkat drastis pada tahun 2015 menjadi 17,3 juta hektar atau sekitar 5,3%,

dan terus bertambah menjadi 23,1 juta hektar (7,1%) pada tahun 2020. Puncaknya, pada tahun 2023, kawasan konservasi laut Indonesia telah mencapai 29,3 juta hektar atau sekitar 9% dari keseluruhan luas laut Indonesia. Capaian ini menggambarkan komitmen Indonesia yang terus meningkat dalam memperluas perlindungan ekosistem laut secara bertahap dan berkelanjutan (Gambar 1).



Gambar 1. Grafik Capaian Nasional Kawasan Konservasi Indonesia
(Sumber: KKP, 2025).

Strategi Kawasan Konservasi dan OECM 2045 disusun sebagai respons terhadap tantangan global, seperti krisis ekonomi dan perubahan iklim, sekaligus mendukung peraturan perundangan nasional serta komitmen Indonesia di tingkat internasional. Strategi ini bertujuan untuk mencapai tiga sasaran utama yaitu perlindungan keanekaragaman hayati laut, perikanan berkelanjutan, dan adaptasi perubahan iklim melalui pendekatan karbon biru.

Salah satu elemen kunci dalam strategi ini adalah penerapan OECM, yaitu upaya konservasi berbasis kawasan yang efektif, namun berada di luar yurisdiksi kawasan konservasi resmi dan dikelola pihak non-pemerintah seperti masyarakat adat, lembaga riset, atau sektor swasta. Konsep OECM pertama kali diperkenalkan dalam Aichi Target 11 pada pertemuan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) tahun 2010, yang menekankan perlunya melindungi 10% wilayah pesisir dan laut dunia melalui Kawasan konservasi dan OECM hingga tahun 2020.

OECM kini dipandang sebagai pendekatan inovatif dalam mendukung konservasi berkelanjutan, dengan dampak yang signifikan terhadap perlindungan ekologi, keanekaragaman hayati, serta manfaat sosial dan ekonomi. Di Indonesia, OECM didefinisikan sebagai kawasan perairan (baik daratan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut lepas) yang berada di luar Kawasan Konservasi resmi, namun dikelola oleh pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, swasta dan/atau masyarakat, dengan tata kelola yang memberikan dampak konservasi yang nyata. Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan salah satu potensi OECM, selain model pengelolaan berbasis masyarakat

lainnya. Berdasarkan studi terkini, potensi OECM di Indonesia mencapai sekitar 10,2 juta hektare atau sekitar 3% dari total target konservasi 30%.

Visi Kawasan Konservasi dan OECM 2045 menetapkan dua target utama. Pertama, peningkatan luasan kawasan konservasi hingga 97,5 juta hektare, yang mencakup keterwakilan ekosistem penting. Kedua, peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi agar seluruh kawasan tersebut mencapai status “dikelola secara berkelanjutan” pada tahun 2045. Strategi peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi dan OECM dibagi ke dalam tujuh bidang kerja (BK) utama, seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuh bidang kerja strategi Kawasan Konservasi dan OECM 2045 (KKP, 2025).

No	Bidang Kerja (BK)	Deskripsi Singkat
1	Perencanaan, Program, dan Penganggaran Terpadu	Penyusunan rencana strategis dan integrasi pendanaan
2	Sumber Daya Manusia, Kompetensi, dan Kapasitas	Penguatan kapasitas teknis dan manajerial pelaku konservasi
3	Kerangka Hukum dan Peraturan	Harmonisasi kebijakan dan regulasi terkait kawasan konservasi dan OECM
4	Pemanfaatan Berkelanjutan	Pengelolaan sumber daya alam laut secara berkelanjutan dan berkeadilan
5	Pembiayaan Berkelanjutan	Pengembangan skema pembiayaan jangka panjang dan kolaboratif
6	OECM	Identifikasi, verifikasi, dan integrasi kawasan OECM dalam sistem konservasi nasional
7	Platform Komunikasi dan Penjangkauan	Strategi komunikasi, pelibatan publik, dan penguatan sistem informasi

Bidang Kerja 7: Platform Komunikasi dan Penjangkauan bertujuan untuk memperkuat komunikasi strategis dalam mencapai tujuan-tujuan konservasi laut. Strategi dalam bidang ini meliputi pengembangan strategi komunikasi, pembangunan platform komunikasi lintas pemangku kepentingan, serta peningkatan partisipasi dan keterlibatan publik.

Salah satu target utama dalam Bidang Kerja ini adalah penguatan SIDAKO (Sistem Database Konservasi; <https://sidako.kkp.go.id>) yang dikelola oleh KKP sebagai platform komunikasi dan interaksi utama antar pemangku kepentingan konservasi laut di Indonesia. SIDAKO diharapkan menjadi pusat informasi yang mudah diakses publik, sekaligus berfungsi sebagai *clearinghouse* nasional, yakni sistem manajemen informasi yang mampu mengelola data dan informasi Kawasan Konservasi dan OECM secara terintegrasi dan terdistribusi. Untuk mendukung fungsi tersebut, koordinasi lintas lembaga akan diperkuat melalui pembentukan Tim Inti Komunikasi dan Koordinasi yang melibatkan perwakilan KKP dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Beberapa Langkah strategis yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Langkah strategis Bidang Kerja 7: platform komunikasi dan penjangkauan (KKP, 2025).

No	Langkah Strategis
1	Pembentukan Tim Inti Komunikasi dan Koordinasi antar lembaga
2	Finalisasi Strategi Komunikasi Nasional untuk konservasi laut dan OECM
3	Pengembangan berbagai Sarana Komunikasi , termasuk media digital dan fisik
4	Penguatan Dukungan Lintas Lembaga untuk kolaborasi dan konsistensi pesan
5	Perluasan fungsionalitas SIDAKO sebagai <i>clearinghouse</i> nasional data kawasan konservasi
6	Pembuatan Platform Komunikasi Publik Interaktif untuk edukasi dan partisipasi masyarakat
7	Sosialisasi Website KKP khusus kepada wisatawan sebagai kampanye peningkatan kesadaran
8	Kampanye yang Dipimpin Pemuda , untuk melibatkan generasi muda dalam isu konservasi laut
9	Penyelenggaraan Acara Khusus Terencana untuk memperkuat narasi publik konservasi laut
10	Publikasi pencapaian Visi KKP dalam forum internasional dan media nasional
11	Menyusun rencana jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan platform komunikasi dan informasi

Berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, ditemukan bahwa beberapa faktor kunci dalam strategi komunikasi yang memainkan peran signifikan dalam memengaruhi persepsi, minat, dan keterlibatan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pencapaian target MPA dan OECM 30x45. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan Sektor Swasta Secara Aktif dan Transparan : Pilar Membangun Kepercayaan (*Trust*)

Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program MPA terbukti menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan. Keterlibatan ini mencakup akses terhadap informasi yang terbuka, partisipasi dalam forum multi-pihak, dan kehadiran nyata aktor lokal dalam dialog kebijakan. Kepercayaan (*trust*) tidak hanya dibangun melalui komunikasi verbal, tetapi juga melalui transparansi proses dan kebijakan yang inklusif (Boezeman & Ellemers, 2014).

Dalam konteks ini, komunikasi strategis berperan menjaga arus komunikasi dua arah dan mencegah dominasi narasi tunggal dari pemerintah, pengelola Kawasan Konservasi, dan NGO. Model komunikasi dialogis yang dikembangkan oleh Kent dan Taylor (2002) menekankan pentingnya keterlibatan yang simetris dan etis, untuk membangun hubungan jangka panjang berbasis kepercayaan dan legitimasi. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa forum yang memungkinkan ruang bagi sektor swasta untuk menyampaikan aspirasi dan keberatan justru memperkuat partisipasi mereka di masa depan.

2. Komunikasi Berbasis Data dan Bukti Dampak Sosial-Ekonomi

Salah satu aspek komunikasi yang paling dihargai oleh sektor swasta adalah penyampaian informasi berbasis bukti (*evidence-based communication*), terutama dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatif mengenai dampak sosial dan ekonomi dari program konservasi. Dalam konteks ini, *Sustainability Report* memainkan peran penting sebagai media dokumentasi dan diseminasi informasi secara sistematis dan terstandarisasi. Laporan keberlanjutan yang menyajikan metrik terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, nilai ekonomi jasa ekosistem, dan efektivitas perlindungan spesies memungkinkan sektor swasta untuk menilai risiko dan peluang secara lebih objektif sebelum memutuskan keterlibatan atau investasi.

Keberadaan *Sustainability Report* juga menjawab kebutuhan sektor swasta akan transparansi, akuntabilitas, dan integritas data dalam pengambilan keputusan investasi sosial dan lingkungan. Ketika laporan disusun mengacu pada standar internasional seperti GRI (*Global Reporting Initiative*) atau SASB (*Sustainability Accounting Standards Board*), maka data dan narasi yang disampaikan memiliki kredibilitas yang tinggi serta diakui oleh para pemangku kepentingan (GRI, 2021; SASB, 2018). Dengan demikian, *Sustainability Report* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pelaporan rutin, melainkan juga sebagai alat komunikasi strategis yang membangun kepercayaan dan memperkuat posisi konservasi sebagai bentuk *impact investment* yang positif.

Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa sektor swasta menunjukkan minat lebih besar untuk menjalin kolaborasi jika informasi konservasi disampaikan dalam format yang selaras dengan *Sustainability Report* yang biasa mereka gunakan. Hal ini memperkuat posisi *Sustainability Report* sebagai jembatan informasi antara pengelola Kawasan Konservasi dan calon mitra dari sektor swasta, sekaligus memperluas pengaruh komunikasi strategis dalam menciptakan ekosistem tata kelola berbasis nilai bersama.

Temuan ini selaras dan menguatkan studi sebelumnya oleh Cvitanovic et al. (2015), yang menunjukkan bahwa translasi hasil riset ke dalam narasi yang relevan dengan kepentingan bisnis merupakan kunci dalam menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan konservasi berbasis investasi. Selain itu, penyampaian data dalam format yang menarik seperti infografis atau dashboard interaktif terbukti lebih efektif dalam menarik perhatian pelaku usaha dibandingkan laporan teknis yang kompleks.

3. Platform Dialog Inklusif: Membentuk Narasi Bersama

Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan platform komunikasi lintas sektor seperti forum komunikasi publik, *roundtable dialog*, atau lokakarya kolaboratif memainkan peran penting dalam membentuk narasi bersama yang inklusif dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Forum-forum ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang diskusi, melainkan sebagai mekanisme deliberatif yang memungkinkan pertukaran pengetahuan, pembentukan konsensus, dan penyelarasan kepentingan antara sektor swasta, pemerintah, LSM, dan pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, sektor swasta tidak lagi diposisikan sekadar sebagai "penyumbang dana", melainkan sebagai mitra strategis yang turut merancang arah kebijakan dan strategi konservasi. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip *co-production of knowledge* dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana kolaborasi

lintas aktor lebih efektif dalam menghasilkan solusi berkelanjutan yang memiliki legitimasi sosial (Armitage et al., 2011; Reed et al., 2010).

Lebih jauh, keberadaan ruang komunikasi kolaboratif ini juga menciptakan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dan tanggung jawab bersama. Hal ini secara signifikan meningkatkan tingkat kepercayaan dan komitmen sektor swasta. Studi oleh Van Tatenhove (2013) menunjukkan bahwa forum komunikasi lintas sektor yang berbasis partisipasi deliberatif mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dan mempercepat implementasi kebijakan berbasis ekosistem di kawasan pesisir dan laut. Partisipasi aktif dalam forum ini membantu sektor swasta memahami dinamika sosial-ekologis lokal, mengurangi risiko reputasi, serta menciptakan peluang sinergi dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan strategi ESG (*Environmental, Social, and Governance*) mereka.

Dengan demikian, keberhasilan komunikasi strategis dalam membangun kemitraan konservasi sangat bergantung pada kemampuan platform lintas sektor untuk menciptakan dialog yang setara, berbasis kepercayaan, dan fokus pada hasil bersama. Penelitian ini menegaskan bahwa desain forum yang terbuka, moderasi yang inklusif, serta dokumentasi dan tindak lanjut yang transparan menjadi faktor krusial dalam memastikan keberlanjutan kolaborasi lintas aktor dalam pengelolaan Kawasan Konservasi laut.

Platform semacam ini mencerminkan konsep *co-creation of meaning* yang dikembangkan dalam literatur komunikasi strategis (Heath & Johansen, 2018). Narasi bersama yang dibangun dalam forum umumnya menekankan pentingnya konservasi untuk stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, dan reputasi sosial perusahaan. Dengan demikian, pendekatan komunikasi dalam konteks ini tidak lagi bersifat persuasif satu arah, tetapi menjadi dialog dua arah yang setara dan bernilai strategis bagi semua pihak.

4. Penguatan Kapasitas Pemerintah daerah sebagai Mitra Kredibel

Pelibatan aktif masyarakat lokal telah lama menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlanjutan jangka panjang pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Dalam praktiknya, keterlibatan pemerintah daerah terbukti meningkatkan keberterimaan sosial (*social acceptability*), memperkuat legitimasi pengelolaan, serta mendorong efektivitas pelaksanaan kegiatan konservasi di tingkat tapak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif tersebut juga memiliki daya tarik tersendiri bagi sektor swasta. Ketika pemerintah daerah dilibatkan secara nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program konservasi, sektor swasta cenderung menunjukkan minat lebih besar untuk menjalin kemitraan atau melakukan investasi. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa keterlibatan masyarakat menciptakan stabilitas sosial, mengurangi potensi konflik, dan mencerminkan adanya kepemilikan lokal terhadap hasil konservasi—faktor-faktor yang penting dalam menilai risiko dan kelayakan investasi.

Namun demikian, penting untuk diakui bahwa pelibatan masyarakat saja tidak cukup. Diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas mereka, baik dalam aspek teknis pengelolaan kawasan, pemantauan sumber daya, pengelolaan keuangan,

maupun komunikasi publik. Penguatan kapasitas ini tidak hanya akan meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi, tetapi juga memperkuat kredibilitas mereka di mata mitra eksternal, termasuk sektor swasta (Brooks et al., 2013). Strategi ini sejalan dengan konsep *local agency* dan *community empowerment*, yang dinilai mampu mendorong keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat (Bennett et al., 2019; Crona et al., 2016).

Program konservasi yang mampu menarik minat investasi biasanya ditopang oleh kapasitas komunitas yang mumpuni—misalnya melalui pelatihan advokasi dan komunikasi, pengelolaan dana yang transparan, serta kehadiran tokoh masyarakat yang dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai lokal dan strategi konservasi. Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai penerima manfaat pasif, melainkan sebagai mitra strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan komunikasi konservasi (Berkes, 2009).

Dengan demikian, mempertahankan pelibatan aktif masyarakat sebagai prinsip utama dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Indonesia merupakan langkah strategis yang harus terus dijaga dan diperkuat. Bagi sektor swasta, prinsip ini menjadi jaminan bahwa program konservasi memiliki akar sosial yang kuat, kredibilitas lokal, serta potensi keberlanjutan yang tinggi—semua elemen penting dalam mendukung investasi yang berbasis pada prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Sementara itu, bagi pengelola kawasan, memperkuat kapasitas masyarakat lokal menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa kolaborasi dengan sektor swasta berjalan dalam kerangka kemitraan yang setara, inklusif, dan berdaya tahan.

5. Konsistensi Pesan, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Indonesia telah memiliki kerangka sistem monitoring dan evaluasi (M&E) efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi laut yang cukup kuat melalui penerapan protokol EVIKA (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi). EVIKA berfungsi sebagai alat pemantauan yang dijalankan secara berkala dan dilaporkan setiap tahun, dengan hasil yang dapat diakses publik melalui platform SIDAKO. Di samping itu, pengukuran indikator ekologis terhadap target konservasi juga telah dilakukan secara periodik di berbagai kawasan, meskipun cakupannya masih terbatas. Pemantauan ini menggunakan metodologi *ecological monitoring* yang telah distandarisasi, dengan indikator utama seperti tutupan karang hidup, biomassa ikan, dan keanekaragaman hayati. Kerangka ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun sistem pengelolaan Kawasan Konservasi yang berbasis data, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan antara keberadaan kerangka sistem tersebut dan implementasinya secara konsisten di lapangan. Beberapa kawasan konservasi belum secara rutin melaksanakan monitoring, atau belum menyajikan hasilnya dalam format yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan, khususnya mitra dari sektor swasta. Ketidakterpaduan data antar lembaga, keterbatasan kapasitas teknis di tingkat tapak, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil M&E sebagai alat komunikasi strategis menjadi tantangan tersendiri.

Dalam konteks membangun kepercayaan sektor swasta, hal ini menjadi penting karena transparansi dalam pelaporan capaian—baik ekologis maupun sosial-ekonomi—

merupakan fondasi utama dalam membangun legitimasi dan kredibilitas. Untuk itu, diperlukan penguatan tata kelola sistem M&E yang tidak hanya fokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada konsistensi pelaporan, visualisasi informasi melalui *dashboard* publik yang interaktif, serta integrasi hasil evaluasi ke dalam strategi komunikasi konservasi. Dengan demikian, sistem M&E yang telah ada dapat benar-benar menjadi instrumen strategis dalam membangun narasi konservasi yang kredibel dan menarik minat investasi dari sektor swasta.

6. Manfaat Ekonomi Jangka Panjang sebagai Narasi Kunci

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi strategis yang menekankan manfaat ekonomi jangka panjang merupakan salah satu pendekatan paling efektif dalam membangun minat dan kepercayaan sektor swasta terhadap program konservasi. Dalam konteks investasi, sektor swasta tidak hanya mencari nilai filantropis, tetapi juga kejelasan imbal hasil jangka Panjang, baik secara finansial maupun reputasional. Oleh karena itu proyeksi ROI (*return on investment*) dari konservasi, seperti peningkatan potensi ekowisata, jasa lingkungan, serta stabilitas ekosistem yang mendukung sektor perikanan dan pariwisata—menjadi sangat penting untuk dikomunikasikan. Selain itu, narasi yang mengaitkan konservasi dengan penguatan reputasi perusahaan melalui *green branding*, serta kontribusi terhadap indikator ESG dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), terbukti mampu memperkuat posisi konservasi sebagai dari strategi bisnis berkelanjutan.

Salah satu responden dari sektor swasta menyatakan bahwa keputusan berinvestasi dalam konservasi laut kini lebih dipengaruhi oleh kalkulasi strategis perusahaan dalam menghadapi risiko lingkungan dan ekspektasi pasar, bukan semata sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini mencerminkan pergeseran perspektif: konservasi dipandang sebagai aset strategis yang mampu memperkuat daya saing dan ketahanan bisnis jangka panjang, khususnya di tengah meningkatnya tekanan regulasi iklim, preferensi konsumen terhadap produk berkelanjutan, serta tuntutan transparansi dalam pelaporan ESG. Hal ini sejalan dengan temuan Boström et al. (2018), yaitu menunjukkan bahwa semakin kuat nilai strategis dan reputasional suatu program lingkungan, semakin tinggi kemungkinan sektor swasta terlibat secara aktif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa komunikasi strategis merupakan elemen kunci yang tidak terpisahkan dari desain tata kelola Kawasan Konservasi laut yang berkelanjutan. Peran komunikasi tidak hanya terbatas pada fungsi promosi atau persuasi, tetapi juga berfungsi sebagai *infrastruktur sosial* yang mendukung terbentuknya kepercayaan, rasa memiliki, dan tanggung jawab kolektif di antara para pemangku kepentingan.

Dalam konteks pencapaian target MPA dan OECM 30x45, komunikasi strategis memegang peran sentral dalam membangun kepercayaan sektor swasta terhadap efektivitas dan kredibilitas program konservasi laut. Pendekatan komunikasi yang terbukti efektif adalah yang bersifat adaptif, inklusif, dan kolaboratif, yakni pendekatan yang tidak hanya menyampaikan informasi secara satu arah, tetapi juga menciptakan ruang dialog antar pemangku kepentingan. Partisipasi aktif sektor swasta, pemerintah,

pengelola Kawasan Konservasi, dan pemerintah daerah dalam forum komunikasi multipihak menghasilkan narasi bersama yang memperkuat legitimasi program dan memperluas dukungan sosial.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi berbasis data dan bukti dampak ekologi, sosial-ekonomi, konsistensi pesan, serta akuntabilitas dalam pelaporan program merupakan faktor kunci yang meningkatkan tingkat kepercayaan sektor swasta. Selain itu, penguatan kapasitas pemerintah daerah sebagai mitra implementasi konservasi secara langsung meningkatkan persepsi terhadap kredibilitas dan kelayakan investasi di bidang ini. Narasi strategis yang menekankan manfaat ekonomi jangka Panjang, seperti peningkatan reputasi perusahaan, kontribusi terhadap SDGs, dan peluang insentif fiskal telah terbukti menjadi daya tarik bagi keterlibatan korporasi secara lebih aktif.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar strategi komunikasi dalam MPA dan OEKM 30x45 disusun secara lebih sistematis dan kontekstual, dengan memperhatikan tiga elemen utama, yaitu: (1) pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi dan penyebaran informasi; (2) pendekatan humanis yang menempatkan relasi sosial sebagai dasar komunikasi; dan (3) insentif kebijakan yang disampaikan secara jelas kepada mitra swasta.

Desain komunikasi yang efektif tidak hanya menjual ide konservasi, tetapi juga membangun lingkungan komunikasi yang memungkinkan sektor swasta merasa dihargai dan terlibat sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, keberhasilan program MPA dan OEKM 30x45 sangat bergantung pada kemampuan institusi pengelola untuk menyusun dan menjalankan strategi komunikasi yang terstruktur, adaptif, dan berbasis kolaborasi. Komunikasi harus dilihat bukan semata alat teknis, tetapi sebagai mekanisme relasional yang memungkinkan penyelarasan antara aspirasi publik dan kepentingan bisnis dalam kerangka pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armitage, D., Berkes, F., Dale, A., Kocho-Schellenberg, E., & Patton, E. (2011). Co-management and the co-production of knowledge: Learning to adapt in Canada's Arctic. *Global Environmental Change*, 21(3), 995–1004. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.04.006>
- Bennett, N. J., Di Franco, A., Calò, A., Nethery, E., Niccolini, F., Milazzo, M., & Guidetti, P. (2019). Local support for conservation is associated with perceptions of good governance, social impacts, and ecological effectiveness. *Conservation Letters*, 12(4), e12640. <https://doi.org/10.1111/conl.12640>
- Bennett, N. J., Govan, H., & Satterfield, T. (2019). Ocean grabbing and marine conservation: Replacing neoliberalism with social justice? *Marine Policy*, 87, 103–110. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.10.023>
- Berkes, F. (2009). Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1692–1702. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.12.001>
- Boezeman, E. J., & Ellemers, N. (2014). Volunteer recruitment: The role of organizational support and anticipated pride in volunteer organizations. *Journal of Applied Psychology*, 99(6), 1013–1023. <https://doi.org/10.1037/a0037254>

- Boström, M., et al. (2018). Towards a social science research agenda for large marine protected areas. *Marine Policy*, 93, 180–185. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.03.022>
- Brooks, J. S., Waylen, K. A., & Mulder, M. B. (2013). Assessing community-based conservation projects: A systematic review and multilevel analysis of attitudinal, behavioral, ecological, and economic outcomes. *Environmental Evidence*, 2(1), 2. <https://doi.org/10.1186/2047-2382-2-2>
- Chuenpagdee, R., & Jentoft, S. (2020). Transforming the governance of small-scale fisheries. In *Interactive Governance for Small-Scale Fisheries* (pp. 3–18). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37371-9_1
- Crona, B. I., Van Holt, T., Petersson, M., Daw, T. M., & Buchary, E. A. (2016). Using social–ecological syndromes to understand impacts of international seafood trade on small-scale fisheries. *Global Environmental Change*, 35, 162–175. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.09.002>
- Cvitanovic, C., Hobday, A. J., van Kerkhoff, L., Wilson, S. K., Dobbs, K., & Marshall, N. A. (2015). Improving knowledge exchange among scientists and decision-makers to facilitate the adaptive governance of marine resources: A review of knowledge and research needs. *Ocean & Coastal Management*, 112, 25–35. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.05.002>
- Cvitanovic, C., McKinley, E., Hobday, A. J., Fudge, M., & Kelly, R. (2021). Research–policy engagement: Building the capacity of research organisations to foster impactful collaborations with decision-makers. *Environmental Science & Policy*, 116, 60–70. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.11.001>
- Faulkner, L., Ayala-Orozco, B., Bojórquez-Tapia, L. A., & Manuel-Navarrete, D. (2018). Strategic environmental communication for socially inclusive conservation: The case of a marine protected area in Baja California, Mexico. *Environmental Communication*, 12(6), 724–738. <https://doi.org/10.1080/17524032.2018.1471033>
- Global Reporting Initiative. (2021). *GRI Standards: Universal Standards 2021*. <https://www.globalreporting.org/standards/>
- Heath, R. L., & Johansen, W. (2018). *Strategic Issues Management: Organizations and Public Policy Challenges*. SAGE Publications.
- Kementerian kelautan perikanan. (2025). *Visi Kawasan Konservasi dan OECM 2045: Strategi Terpadu Menuju Laut Indonesia Lestari dan Berkelanjutan*.
- Kent, M. L., & Taylor, M. (2002). Toward a dialogic theory of public relations. *Public Relations Review*, 28(1), 21–37. [https://doi.org/10.1016/S0363-8111\(02\)00108-X](https://doi.org/10.1016/S0363-8111(02)00108-X)
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080335>
- Reed, M. S., Evely, A. C., Cundill, G., Fazey, I., Glass, J., Laing, A., ... & Stringer, L. C. (2010). What is social learning? *Ecology and Society*, 15(4), 1–10. <https://doi.org/10.5751/ES-03564-1504r01>
- Runhaar, H., Driessen, P., & Uittenbroek, C. (2016). The role of boundary organizations in climate adaptation planning: A case study of Dutch regional adaptation support tools. *Environmental Science & Policy*, 66, 428–438. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.07.003>
- Sustainability Accounting Standards Board (SASB). (2018). *Conceptual Framework*. <https://sasb.org/standards/conceptual-framework/>
- Van Tatenhove, J. P. M. (2013). How to turn the tide: Developing legitimate marine governance arrangements at the level of the regional seas. *Ocean & Coastal Management*, 71, 296–304. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2012.11.004>

